

# Prisma

*Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*

Politik  
Kartel Para "Bos"

## *Menuju Indonesia Masa Depan*



**LP3ES**

Rp 30.000,00



Vol 28, Oktober 2009

2

Franz Magnis-Suseno:

## Kita Butuh Proyeksi Besar Cita-cita Bangsa

*Berbagai konflik yang berlangsung terus-menerus, dan terkadang disertai kekerasan, mengisyaratkan bahwa bangsa ini tengah menghadapi tantangan kebangsaan yang luar biasa besar. Keputusan-keputusan strategis menyangkut kepentingan dan agenda bersama acap kali menemui jalan buntu. The founding fathers telah memberikan landasan bagi pengaturan hidup berbangsa, namun hingga saat ini — di tengah-tengah frustrasi sosial — bangsa Indonesia masih terus mencari format berbangsa yang lebih stabil. Apa yang sesungguhnya terjadi pada bangsa Indonesia saat ini? Akankah ditemukan jawaban atas persoalan itu? Lantas, bagaimana arah dan masa depan bangsa Indonesia?*

*Untuk mendalami persoalan tersebut, Redaksi Prisma berdialog dengan Prof Dr Franz Magnis-Suseno, SJ, guru besar filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Berikut petikan hasil dialog tim Redaksi Prisma, Rahadi T Wiratama dan MA Satyasuryawan, dengan Romo Magnis.*

**Prisma:** *Di era reformasi ini kita belum punya suatu forum yang secara khusus membicarakan tentang manusia Indonesia dengan segala kemelut dan problematikanya. Menurut Romo, bagaimana kita memahami sosok manusia Indonesia dari zaman ke zaman?*

**Franz Magnis-Suseno:** Manusia Indonesia tidak bisa dilihat secara statis. Dia harus dilihat sebagai sebuah entitas dinamis yang tengah berhadapan dengan sekian banyak tantangan. Dalam menyikapi berbagai tantangan itulah jati diri manusia Indonesia terus-menerus dibentuk. Pertanyaannya, di mana posisi nilai-nilai, cita-cita, dan harapan-harapan yang menentukan manusia Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan itu? Dalam konteks demikian yang harus diciptakan adalah sejumlah kondisi yang

memungkinkan manusia Indonesia tidak hanya dapat berjuang untuk *survive*, sebagai salah satu upaya menyesuaikan diri dengan alam persaingan yang amat keras, tetapi juga kondisi yang memungkinkan terwujudnya keterbukaan, keamanan ekonomis, dan bebas dari rasa takut. Dengan kondisi semacam ini manusia Indonesia berpeluang menjawab seluruh masalah yang dihadapi berdasarkan kerangka kekayaan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada dirinya.

“Orang kecil” yang jumlahnya sekitar 40 persen dari total bangsa Indonesia dan berpendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari umumnya selalu terlibat dalam *survival of the fittest* yang sangat keras. Keutamaan-keutamaan nilai, seperti toleransi, tahu diri, dan memperhatikan sesama, adalah hal-hal yang terlalu mahal bagi mereka. Memang, akibat dari modernisasi dan

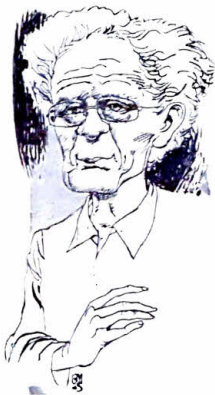
pembangunan bisa membuat orang menjadi "keras", picik, preman, atau terjerumus dalam ideologi fanatik. Sebaliknya, jika orang dapat hidup dengan wajar, merasa cukup aman, tidak takut menunjukkan eksistensi diri dan dapat menghidupi keluarga, dengan sendirinya dia mampu meneropong masa depan secara lebih jernih. Hal semacam itu akan memunculkan reaksi yang lebih manusiawi, matang, dan positif, dalam melihat sekaligus mampu memberi jawaban terhadap tantangan modernitas dewasa ini.

**P:** Menurut Romo, berbagai perubahan sosial-ekonomi berdampak pada perilaku dan sifat masyarakat Indonesia. Bentuk perilaku seperti apa yang perlu dicermati?

**FMS:** Salah satu perilaku warga masyarakat marginal yang sering merasa tak berdaya adalah "gemar rebutan". Mereka tidak berpikir tentang cita-cita, karena tatanan yang ada juga tidak memberi ruang untuk mewujudkan nilai-nilai budaya Indonesia sendiri, seperti gotong royong, misalnya. Dalam situasi seperti itu sikap luhur bangsa menghilang dan tidak bisa berkembang. Tidak ada *mutual trust* di negeri ini. Orang tidak akan memahami budaya antre kalau tidak ditata dengan baik, misalnya.

Dalam beberapa hal mungkin kita bisa mencontoh Singapura dengan Lee Kuan Yewnya. Di bawah Inggris, pulau itu tidak punya nama seperti sekarang. Negara-kota yang semula merupakan permukiman China itu sekarang tumbuh dan berkembang menjadi kota yang tertib, dan tampaknya banyak orang yang senang dengan keadaan ini. Kita tahu bahwa Indonesia umumnya dan Jakarta khususnya jauh lebih susah ditata daripada Singapura. Namun, tidak adil bila Indonesia atau Jakarta dibandingkan dengan Singapura yang hanya berpenduduk tiga juta orang dan tanpa ada penambahan penduduk baru. Di sisi lain, kondisi kita sekarang ini juga mulai membaik ketimbang masa-masa sebelumnya.

Fenomena korupsi juga memiliki kontribusi tersendiri pada frustrasi sosial di Indonesia. Ko-



Prof Dr FRANZ MAGNIS-SUSENO, SJ, lahir di Eckersdorf, Jerman, 26 Mei 1936. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Driyarkara, Jakarta, ini datang ke Indonesia pada 1961 untuk belajar filsafat dan teologi di Yogyakarta. Setelah ditahbiskan menjadi imam, dia ditugaskan untuk belajar filsafat di Jerman sampai memperoleh gelar doktor di bidang filsafat dengan disertasi mengenai Karl Marx.

Tulisan-tulisannya telah dipublikasikan dalam puluhan artikel dan sejumlah buku, antara lain berjudul *Etika Jawa*. Buku lain yang menjadi acuan pokok bagi mahasiswa filsafat dan ilmu politik di Indonesia adalah *Etika Politik*. Franz Magnis-Suseno memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang teologi dari Universitas Luzern, Swiss.

rupsi bisa menggerogoti semuanya, termasuk rasa bangga masyarakat atas negeri ini. Jika instansi negara apalagi Dewan Perwakilan Rakyat tidak lebih terlihat sebagai tempat orang melayani kepentingan diri sendiri, maka akan matilah semangat demokrasi, karena semakin banyak orang yang kemudian tidak yakin dengan demokrasi. Kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara dapat kian meredup, yang kemudian berganti mentalitas membonceng atau mencari patron. Itu semua dapat menggerus rasa kebangsaan. Tamatlah riwayat dan semangat tanpa pamrih.

**P:** *Di tengah situasi itu law enforcement kelihatan tak berdaya. Apa pendapat Romo?*

**FMS:** Di sisi lain, memang terlihat bahwa masyarakat kita juga makin tidak disiplin. Tapi hal ini bersumber dari lemahnya *law enforcement*. Hukum tidak dapat memberi kepastian, misalnya, dalam perilaku berlalu-lintas atau budaya antre. Orang Indonesia selalu dituding belum bisa menerapkan budaya antre. Persepsi itu mungkin tidak seluruhnya benar. Di stasiun kereta api, misalnya, orang bisa antre dan tertib, tidak perlu ada pengatur untuk beli karcis.

Hal yang sama berlaku terhadap kekerasan atas nama agama. Negara harus bersikap tegas dalam kasus Ahmadiyah, misalnya. Mungkin Ahmadiyah sesat dari sudut pandang Islam, tetapi negara seharusnya tidak boleh membiarkan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah, karena mereka adalah warga negara Indonesia yang hak-haknya dilindungi konstitusi. Sudah tiga atau empat masa bulan Ramadhan tidak terjadi *sweeping* terhadap pusat-pusat hiburan malam di Jakarta. Itu terjadi karena beberapa tahun silam polisi menyatakan bahwa mulai saat ini tidak akan diizinkan segala bentuk main hakim sendiri. Itu satu contoh positif bahwa kesungguhan *law enforcement* tidak saja menghasilkan ketenangan di masyarakat, tetapi juga kepastian bahwa masyarakat luas memperoleh perlindungan dari negara.

**P:** *Lantas bagaimana dengan soal identitas kultural manusia Indonesia di tengah perubahan sosial-ekonomi dan problematik semacam itu?*

**FMS:** Kembali ke tradisi tidak selalu merupakan jawaban atas problem dan tantangan modernitas. Di sisi lain, tradisi juga tidak mudah hilang; orang Indonesia punya keterikatan mendalam dengan budayanya. Jadi, keindonesian tidak perlu dikhawatirkan akan tergerus. Nasionalisme dengan basis kultural semacam itu juga tidak perlu dikhawatirkan. Contohnya adalah cara hidup masyarakat Jepang sekarang yang sepiintas tampak kebarat-baratan. Akan tetapi, orang Jepang tetap orang Jepang. Berbeda dengan Jepang, ikatan sosial bernama keindonesian sering kali tidak memiliki ruang artikulasi cukup memadai dalam deru modernitas. Ilustrasi paling mencolok adalah perilaku berlalu-lintas di Jakarta di mana *everybody fight for himself* tanpa memedulikan orang lain. Akibatnya, segala nilai budaya itu hampir tidak terasa, karena orang dikungkung logika modernitas: asal bisa lebih cepat. Situasi seperti ini tidak menguntungkan untuk pengembangan manusia Indonesia.

**P:** *Dikaitkan dengan proses kesadaran berbangsa, jika sampai hari ini masih ditemui berbagai gejala menguatnya politik identitas, menurut Romo, apa yang melatarbelakanginya? Apakah menguatnya politik identitas dapat dimaknai proses menjadi nation masih terus berlangsung hingga saat ini?*

**FMS:** Benar. Proses berbangsa memang tidak akan pernah selesai, karena konstruksi kebangsaan itu sendiri tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk oleh gerak dinamika sejarah. Di sisi lain, generasi sekarang tidak memiliki pengalaman yang sama dengan generasi perintis. Dengan demikian, ada dua pengalaman yang jauh berbeda. Generasi perintis memiliki pengalaman ketertindasan dan ketidakbebasan di bawah kolonialisme asing. Faktor inilah yang kemudian melahirkan cita-cita suatu Indonesia

